

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

FITRIANI DAN ZAILI RUSLI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, Kampus Bina
Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail : fitriani_won@yahoo.com

Abstrac : Poverty is one of the fundamental problems that become the center of attention of the government in any country. One important aspect to support poverty reduction strategies is the availability of accurate data on poverty and on target. Good poverty data can be used to evaluate government policies on poverty , comparing poverty across time and regions, as well as determining the target the poor with the aim of improving their condition. Poverty reduction by focusing on community empowerment as the operational approach , commits the government in realizing welfare for society. One of the poverty reduction program is Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). To improve the effectiveness of poverty alleviation and job creation , the government launched Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) started in 2007. These results indicate that the program in the district in the implementation of Siak Hulu has not done well. Implementation of empowerment that do still right on target, there are still poor people who have not been helped by the PNPM Mandiri , the poor economy is still low and should be considered as well as PNPM assistance in order to create well-beingofsociety.

Keywords : evaluation , input , policy process , output, outcome , impact dam feedback.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk

mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen yang baik bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Umum dibentuknya PNPM Mandiri menurut pedoman umumnya adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri adalah

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, Kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok pedulilainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya.

6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam implementasinya, jenis kegiatan yang dibiayai melalui PNPM Mandiri perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana atau sarana dasar.
Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana atau sarana dasar yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin ataupun rumah tangga miskin. Kegiatan ini berupa kegiatan semenisasi jalan, pembangunan drainase atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yaitu kegiatan yang di danai oleh PNPM Mandiri yaitu berupa pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pelajar sekolah dasar (SD) yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin. Pemberian bantuan biaya pendidikan diharapkan mampu meningkatkan prestasi pelajar yang mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut. Pada bidang kesehatan yaitu kegiatan pemberian imunisasi pada balita-balita agar ketahanan tubuh balita tetap terjaga.
- c. Kegiatan peningkatan keterampilan kelompok usaha ekonomi.
Kegiatan peningkatan keterampilan kelompok usaha ekonomi, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi. Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat miskin berupa kegiatan pelatihan menjahit. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk memberdayakan kemampuan yang dimiliki sehingga akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
Kegiatan ini berupa kegiatan penambahan modal bagi kelompok perempuan. Sasaran program yaitu rumah tangga miskin yang produktif. Ketentuan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu :
 1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yaitu saling mengenal antara satu dan yang lainnya, memiliki kegiatan tertentu dan mengadakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam setahun.
 2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan kegiatan simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 3. Telah mempunyai modal dan simpanan anggota sebagai sumber dana.
 4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung baik.

5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Dengan adanya tujuan dan ketentuan-ketentuan dasar pengelolaan dalam pengelolaan SPP diharapkan ke depannya merupakan cikal bakal pembentukan masyarakat yang aktif dalam berperandalam menanggulangi kemiskinan di daerah melalui kegiatan perguliran dana oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dan apakah faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut.

pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood dalam Mardikanto dan Soebianto 2012: 26).Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Istilah pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne dalam Rukminto (2008: 77), yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna :

“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by oncreasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”. (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Shardlow dalam Rukminto (2008: 78), melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan

sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) yang dikenal dibidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nama "*self determination*". Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Amartya Sen dalam Zubaedi (2007: 97) mendefinisikan pemberdayaan dengan menekankan pentingnya kebebasan hakiki dan kebebasan individual dalam memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Selain itu, World Bank mengartikan *empowerment* sebagai *expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that effect their live* (pemberdayaan adalah perluasan aset-aset dan kemampuan-kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, memengaruhi, mengontrol, serta mengendalikan tanggungjawab lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya).

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan focus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi.

Evaluasi kebijakan menurut **Subarsono (2010 :119-121)** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Semakin strategis suatu kebijakan maka diperlukan tenggang waktu yang lama untuk melakukan evaluasi. Subarsono memandang kebijakan sebagai suatu proses yang terdiri dari *input*, proses kebijakan, *output*, *outcome*, *impact* dan *feedback*.

1. *Input* yaitu bahan baku yang digunakan sebagai bahan masukan dalam sebuah masukan dalam sebuah system kebijakan dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya financial, tuntutan-tuntutan maupun dukungan-dukungan dari masyarakat.
2. *Output* yaitu keluaran dari sebuah system kebijakan yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan / jasa, dan dapat berupa program.
3. *Outcome* yaitu hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.
4. *Impact* yaitu akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekwensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (qualitatif research). Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan pemaknaan setiap even merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Pemilihan disain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturn dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif atau secara proporsional. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/ aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (key informan) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik “snowball sampling” atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena dana usaha yang diperoleh masyarakat tidak semua digunakan untuk pengembangan usaha melainkan banyak digunakan untuk keperluan lainnya. Usaha yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan hasil karena keuntungan dari usaha tersebut telah habis untuk membayar angsuran sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri adalah program yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga

mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Evaluasi kebijakan menurut **Subarsono (2010 : 191-121)** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang panjang dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Skema umum dalam evaluasi adalah input, proses kebijakan, output, outcomes, impact dan feedback.

Agar lebih jelas mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam penelitian ini, maka usaha yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dengan ini maka penulis menguraikan rincian mengenai indikator evaluasi program yang ada. Adapun indikator dari evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam penelitian ini adalah :

1. Input

Input yaitu bahan baku yang digunakan sebagai bahan masukan dalam sebuah sistematisa kebijakan. Kebijakan disini yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang memiliki sub indikator sebagai berikut :

- a. Sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memperoleh dana yang berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari pinjaman/hibah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah;
- c. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah keatas dari total BLM di kabupaten/kota;
- d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility);

- e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).

Dari hasil wawancara dapat kita lihat bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pendanaannya berasal dari sharing APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten, dimana dana tersebut diberikan kepada desa dan diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerimanya yaitu masyarakat miskin yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha agar bias meningkatkan kesejahteraannya. Kategori masyarakat miskin disini yaitu memiliki criteria pendapatan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan minimum dan rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik akibat kelangkaan modal.

- b. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengalaman pengelola dan pemanfaat

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri haruslah yang berkualitas bukan hanya dari segi pendidikan namun juga dalam kepiawaian berorganisasi serta kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memperlancar kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam segala aspek. Pengelola harus berjiwa pemimpin dan mempunyai tujuan membantu masyarakat kecil agar pengelolaan program dilakukan secara tepat sasaran dan benar. Bagi pemanfaat pendidikan tidaklah begiti penting, yang lebih penting lagi adalah pengalaman yang baik dalam melakukan usaha dan kesadaran akan membayar angsuran, sehingga tujuan dari program ini yaitu memberdayakan masyarakat itu sendiri dapat tercapai. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali segenap potensi dan mengembangkannya agar manusia tersebut dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

2. Proses

Sedangkan proses adalah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikator :

a. Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Kegiatan sosialisasi suatu kebijakan sangatlah di butuhkan karena dengan cara ini kebijakan dapat di publikasikan dan dikenal kepada masyarakat dengan demikian masyarakat dapat mengetahui mengenai adanya suatu program. Dalam penelitian yang dilaksanakan, ditemukan fakta bahwa proses PNPM mandiri adalah diawali dengan sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Bahwa segala sesuatu kegiatan dalam PNPM Mandiri haruslah melalui musyawarah, baik tingkat kelompok masyarakat, tingkat dusun, tingkat desa dan kecamatan. Musyawarah di berbagai tingkatan seperti itu akan memunculkan sebuah pengerucutan permasalahan atau gagasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan, ditemukan fakta bahwa proses PNPM Mandiri adalah diawali dengan sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Bahwa segala sesuatu kegiatan dalam PNPM Mandiri haruslah melalui musyawarah, baik tingkat kelompok masyarakat, tingkat dusun, tingkat desa dan kecamatan. Musyawarah di berbagai tingkatan seperti itu akan memunculkan sebuah pengerucutan permasalahan atau gagasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Fakta di lapangan yang terjadi adalah masyarakat sendiri mulai dari yang terkecil tahap penggalian gagasan di tingkatan kelompok masyarakat sampai tahap terakhir, tahap pelestarian sangat antusias mengikutinya. Berdasarkan hasil penelitian dengan 3 (tiga) kepala desa yaitu: Desa Pangkalan Baru, Desa Buluh Cina dan Desa Kubang Jaya, semua lurah memberikan pandangan yang sama bahwa masyarakat sangat menyambut antusias dengan adanya PNPM Mandiri.

b. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Selama 3 (tiga) tahun PPK dilaksanakan di Kecamatan Siak Hulu telah diberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut adalah kegiatan fisik, kegiatan ekonomi dan kegiatan PKK (Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat). Hasil dari berbagai kegiatan tersebut dapat dinikmati di seluruh desa di Kecamatan Siak Hulu. Walaupun hasil kegiatan atau bantuan itu di masing-masing desa dapat berbeda atau bahkan sama, karena kegiatan tersebut yang menentukan masyarakat itu sendiri. Dengan dibangunnya jalan menuju posyandu tersebut akses menjadi lancar, sehingga transportasi menjadi tidak ada kendala lagi.

Hal tersebut menjadikan akses Pelayanan kesehatan bagi desa Kubang jaya yang selama ini terhambat menjadi lebih baik.

Dari pernyataan tersebut memberikan arti bahwa kegiatan yang dibangun terutama kegiatan fisik menjadikan masyarakat puas dan benar-benar bermanfaat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tak lepas dari perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritasnya.

Sedangkan untuk kegiatan ekonomi, hampir senada dengan kegiatan fisik, bantuan yang diberikan dari dana PNPM Mandiri telah dipergunakan bagi usaha ekonomi produktif. Dengan pemanfaat yang hampir 75 % adalah perempuan, dari observasi dan wawancara di lapangan ditemukan fakta bahwa bantuan tersebut dipergunakan untuk penambahan modal usaha mereka walaupun masih dalam skala kecil.

Gambaran-gambaran di atas kiranya dapat menggambarkan bahwa pemberian bantuan pembangunan prasarana fisik maupun pemberian bantuan kegiatan ekonomi PNPM Mandiri benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Khususnya untuk kegiatan ekonomi, walaupun dengan adanya bantuan tersebut tidak serta merta atau langsung dapat merubah tingkat kesejahteraan atau pendapatan, namun pada prinsipnya bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan usaha ekonomi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat. Dan yang menjadi titik tolak dari hasil-hasil kegiatan dalam PNPM Mandiri di Kecamatan Siak Hulu adalah bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan bantuan yang sifatnya memberi rangsangan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraannya

Namun dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan terdapat beberapa permasalahan yang timbul diantaranya tidak tepatnya sasaran program yaitu masyarakat miskin. Tingginya minat masyarakat untuk meminjam dana, sementara dana yang ada hanya terbatas. Selain itu banyaknya masyarakat yang menunggak .

Dari pedoman PNPM Mandiri terlihat bahwa sasaran utama adalah miskin, padahal kenyataannya pemberian dana kepada masyarakat miskin memang masih terjadi pemilihan atas orang-orang yang menerima dana tersebut yakni hanya orang-orang yang dikenal oleh pengelola saja yang diberikan pinjaman.

Peminjaman kepada masyarakat miskin yang tidak diberikan syarat agunan membuat pengelola hanya dapat meminjamkan dana kepada mereka yang dikenal saja sementara mereka yang tidak dikenal tidak dapat diberikan pinjaman. Hal ini

dikarenakan mereka yang tidak dikenal oleh pengelola tersebut tidak diketahui karakteristiknya, pengelola takut jika nantinya dana yang diberikan kepada mereka yang tidak dikenal pengelola tanpa agunan tersebut akan membawa lari dana tersebut dan pengelola menjadi rugi.

3. Output

Output yaitu keluaran dari suatu system kebijakan. Kebijakan disini adalah kebijakan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan sub indicator sebagai berikut :

- a. Perkembangan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana cara menutupi atau mengurangi kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan public harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dari suatu program dengan hasil yang akan diperoleh dari gambaran yang lebih objektif atas kegagalan atau keberhasilan suatu program.

- b. Permasalahan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan solusinya

Dan dapat disimpulkan bahwa output dalam Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar “**kurang baik**” dilihat dari dana sudah berkembang namun perkembangan dana tersendat, banyaknya masyarakat yang melakukan penunggakan dan banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk pengembangan usaha justru dipergunakan untuk keperluan lainnya.

4. outcome

Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu akibat diterapkannya suatu kebijakan, kebijakan disini adalah Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan sub indicator sebagai berikut :

- a. Ada atau tidak perubahan pada sasaran program

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini tidak menimbulkan perubahan yang begitu berarti bagi masyarakat kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program ini sehingga masyarakat yang meminjam menyalahgunakan pinjaman yang menyimpang dari tujuan pemberian dana PNPM Mandiri yaitu memberdayakan

masyarakat melalui peningkatan ekonomi dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha, sementara pada kenyataannya masyarakat malah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga jika dana habis mereka mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut dan terjadi penunggakan yang besar.

b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di kecamatan Siak Hulu, masyarakat yang mendapat pinjaman dana tidak banyak membawa perubahan bagi masyarakat miskin. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah sehingga pendapatan rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi atau karna factor keturunan.

Dapat disimpulkan bahwa outcome “ **kurang baik**” disebabkan oleh penggunaan dana yang tidak tepat, kurang berkembang usaha yang dijalankan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar angsuran.

5. Impact

Impact adalah akibat lebih jauh kepada masyarakat sebagai konsekwensi adanya kebijakan yang diterapkan, kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

a. Seberapa besar signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pemanfaat merasa manfaat dana tersebut belum terlihat nyata. Ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pemanfaat dan tidak bias mempertahankan usahanya dan hanya bergantung pada dana yang dipinjamkan. Tujuan dari PNPM mandiri yaitu untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekonomi namun banyak dari pemanfaat yang menyalahgunakan dana, terjadi penunggakan sehingga tujuan PNPM mandiri tidak tercapai dengan harapan diadakannya program simpan pinjam.

6. Feedback

Feedback yaitu umpan balik dari dampak program yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.berhasil atau tidaknya menanggulangi kemiskinan, dengan sub indicator :

a. Dengan adanya PNPM Mandiri tingkat kemiskinan berkurang dan masyarakat berdaya

Dengan adanya PNPM Mandiri ini diharapkan tingkat kemiskinan berkurang dan masyarakat berdaya. Tapi pada kenyataannya dilapangan program ini tidak mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat. Banyaknya masalah yang timbul sehingga tujuan dari program ini tidak tercapai dan tidak bias memberdayakan

masyarakat. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa feedback “ tidak baik” karena melalui program ini sebagian besar masyarakat tidak berdaya. Tujuan dari program ini tidak tercapai karna banyaknya masalah yang timbul.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. Faktor sumber daya manusia

Untuk memperlancar program diperlukan adanya kerja sama diantara para pelaku sehingga bila terjadi suatu masalah maka harus segera diselesaikan agar tidak mempengaruhi perkembangan program.

2. Faktor budaya

Factor budaya adalah salah satu penghambat , dimana masyarakat beranggapan bahwa modal yang dipinjam adalah dana hibah dari pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak perlu mengembalikannya lagi.

KESIMPULAN

Setelah peneliti mengelompokkan, mengolah, dan membahas hasil penelitian mengenai Evaluasi Efektifitas PNPM Mandiri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan yaitu Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan alat evaluasi yang terdiri dari *input*, proses kebijakan, *output*, *outcome*, *impact* dan *feedback* “tidak berhasil” karena tidak tercapainya semua indicator yang telah ditentukan.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat miskin masih belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan belum tepat sasaran kemasyarakat miskin, Bantuan yang diberikan masih belum diterima oleh warga masyarakat yang benar-benar miskin. Memang dari segi perguliran dana jika bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar miskin terdapat dilema terhadap pelestarian kegiatannya. Diasumsikan jika diberikan kepada warga yang benar-benar miskin maka akan terdapat ketidaklancaran dalam proses pengembaliannya dan hal tersebut akan mengganggu tahap-tahap selanjutnya.

Factor-faktor yang mempengaruhi PNPM Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Factor sumber daya manusia
Sumber daya manusia, pengelola dan pemanfaat kurangnya kerja sama antar pelaku kegiatan mengakibatkan dana tidak tepat sasaran, selain itu masalah yang timbul adalah dari sisi pemanfaat yang melalaikan kewajibannya untuk membayar tunggakan.
- b. Factor budaya
Adanya asumsi dari pemanfaat sendiri bahwa dana yang dipinjamkan oleh pemerintah melalui program ini tidak perlu dikembalikan lagi. Selain itu dana yang seharusnya dipinjam bertujuan untuk pengembangan usaha malah dipergunakan untuk keperluan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan.1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____ 2008. *Public Policy Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alvabeta
- Syafiie, Inu Kencana dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____ 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan publik*. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.